

STRATEGI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

**Disampaikan pada Silaturahmi Keluarga Besar Kedutaan Besar Indonesia
untuk Negara-negara Rusia, Persemakmuran Negara-negara Merdeka (PNM /C.I.S.),
dan Kelompok Negara Skandinavia
Jakarta, 23 Agustus 1997**

I. Pendahuluan

Hari ini saya merasa berbahagia dan mendapat kehormatan yang besar dapat bertemu dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Duta Besar serta hadirin sekalian. Kesempatan silaturahmi semacam ini merupakan kesempatan yang jarang dapat kita peroleh, karena itu saya merasa gembira bahwa pada sesi nanti dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai perkembangan hubungan negara kita dengan negara-negara Rusia, Persemakmuran Negara-negara Merdeka (PNM /C.I.S.), dan kelompok negara Skandinavia. Berbagai informasi semacam itu sangat kita perlukan dalam menyusun dan menyempurnakan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional.

Merenungkan kembali strategi dan pelaksanaan pembangunan memang merupakan sesuatu yang perlu terus dilakukan, terlebih lagi dalam suasana hari kemerdekaan Indonesia yang ke-52. Peringatan hari kemerdekaan, selain diisi dengan mengenang jasa para pahlawan agar semangatnya dapat terus diteruskan dari generasi ke generasi, digunakan pula untuk melihat kembali perjalanan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengenali kekurangan, meningkatkan kinerja bagi hal-hal yang sudah berlangsung dengan baik, dan mengenali tantangan-tantangan baru. Meskipun kegiatan semacam itu seolah-olah merupakan sesuatu yang rutin, sesungguhnya tidak demikian halnya. Karena di dalamnya selalu terkandung makna tantangan-tantangan baru dan masalah-masalah pembangunan yang baru yang untuk menghadapinya memerlukan penyegaran pemikiran-pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, saya akan menguraikan strategi pembangunan nasional diikuti dengan pelaksanaannya, termasuk kebijaksanaan dan perkembangan perekonomian, dalam tiga tahun Repelita VI. Dengan demikian kita dapat mendapatkan gambaran permasalahan pembangunan yang dihadapi untuk dapat menentukan langkah-langkah yang lebih baik di kemudian hari.

II. Strategi Umum Pembangunan Nasional Dalam Repelita VI

Sebagai pembaharuan dari Repelita VI, prioritas diberikan pada pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan semakin difokuskan kepada unsur manusianya.

Prioritas yang semakin tinggi diberikan kepada peningkatan kualitas SDM. Di dalam sektor pendidikan, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama pendidikan dasar serta pendidikan kejuruan, untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan profesional yang memenuhi kebutuhan pembangunan. Selain itu, kita akan menuntaskan program Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun selambat-lambatnya pada akhir Repelita VIII. Derajat kesehatan juga akan ditingkatkan terus, karena selain memiliki tingkat pendidikan yang memadai, manusia Indonesia juga harus memiliki derajat kesehatan yang menunjang. Kualitas SDM yang meningkat tersebut akan berpengaruh, tidak saja pada pemecahan masalah produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun juga akan berpengaruh pada pemecahan masalah-masalah kesenjangan, kemiskinan, lapangan kerja, dan stabilitas.

Pertumbuhan ekonomi yang memadai tetap diperlukan untuk mencapai sasaran umum Repelita

VI. Pertumbuhan ini, yang juga didorong oleh peningkatan kualitas SDM, antara lain diperlukan untuk menciptakan kesempatan kerja guna dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja sekitar 12,6 juta selama 5 tahun tersebut. Dalam kurun waktu Repelita VI, pertumbuhan ekonomi diupayakan untuk mencapai rata-rata 7,1 persen setahun. Sementara itu, pertumbuhan penduduk diharapkan menurun menjadi sekitar 1,5 persen pada akhir Repelita VI. Dengan demikian, pada akhir Repelita VI pendapatan per kapita akan mencapai sekitar US\$1.280.

Sesuai dengan GBHN 1993 yang menekankan pada pembangunan yang makin berkeadilan dan merata dalam PJP II, maka upaya-upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan terus akan ditingkatkan. Penciptaan kesempatan kerja produktif yang memadai, untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka maupun terselubung, merupakan salah satu upaya dalam rangka pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada pola yang menunjang penciptaan kesempatan kerja yang produktif ini. Selain itu, sejak awal Repelita VI telah dilaksanakan program untuk menanggulangi secara khusus masalah kemiskinan, seperti misalnya Inpres Desa Tertinggal (IDT). Upaya ini telah dilengkapi dengan program Takesra/Kukesra yang dilaksanakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha.

Untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan, stabilitas ekonomi akan terus dipertahankan agar senantiasa mantap. Dengan stabilitas ekonomi, dunia usaha akan lebih mempunyai kepastian dalam menjalankan maupun meningkatkan usahanya, yang pada gilirannya akan pula menciptakan kesempatan kerja. Selain itu, stabilitas ekonomi berarti daya beli masyarakat akan terlindungi, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat yang berpenghasilan tetap. Misalnya stabilitas harga kebutuhan pokok sangat mempengaruhi daya beli bagian terbesar masyarakat.

III. Pelaksanaan Repelita VI

Dalam melaksanakan pembangunan nasional kita berpedoman pada Trilogi Pembangunan. Kita mengupayakan keserasian antara pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas nasional. Karena disadari bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat dapat mengabaikan pemerataan dan membahayakan stabilitas nasional. Jika pemerataan yang terlalu ditekankan dengan mengorbankan pertumbuhan, maka daya dorong peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menurun dan pada gilirannya justru akan merugikan upaya pemerataan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan keinginan untuk mempertahankan stabilitas nasional secara berlebihan, dapat mengurangi kemampuan untuk memeratakan pembangunan dan mempertahankan pertumbuhan yang memadai.

Trilogi Pembangunan ini, karena seringnya dituliskan dan diucapkan, kadang dirasakan sebagai sesuatu yang *cliche*. Tetapi sesungguhnya, ia mempunyai makna yang dalam dan nilai implementasi yang tinggi. Dalam merancang dan melaksanakan APBN dalam dua tahun terakhir ini, selalu diupayakan agar pada akhir tahun anggaran dapat dihasilkan surplus anggaran. Surplus tersebut, bersama dengan kebijaksanaan moneter, ditujukan untuk menurunkan suhu perekonomian yang dianggap cukup panas seperti tercermin dalam inflasi dan defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi.

Dalam merencanakan anggaran pembangunan misalnya kita mengupayakan pemerataan. Kontribusi masyarakat dalam menciptakan pertumbuhan sudah semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah, melalui anggaran pembangunannya, semakin banyak mencurahkan perhatian pada pemerataan. Misalnya, untuk membiayai pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Sejak awal Repelita VI kita juga memperkenalkan Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kini memasuki tahun keempat. Upaya besar ini akan terus berlanjut karena pada dasarnya dana IDT terus bergulir.

Meskipun anggaran pembangunan semakin diarahkan untuk upaya-upaya pemerataan, tidak berarti upaya mendukung pertumbuhan dibiarkan. Memang, swasta sudah semakin kuat, tetapi tidak semua investasi diminati oleh swasta misalnya untuk infrastruktur seperti listrik pedesaan, jalan di wilayah yang masih belum berkembang, dan sebagainya. Investasi semacam itu diperlukan, tidak saja sebagai upaya pemerataan, tetapi juga untuk menjamin bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi dapat dipertahankan. Kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi itu akan semakin besar dengan semakin

banyaknya potensi nasional yang dapat kita manfaatkan.

Selain itu pemerintah, melalui kekuatan regulasinya, mengupayakan agar stabilitas juga terjaga. Termasuk di sini adalah peraturan, yang baru dikeluarkan pada bulan Juli lalu, yang tidak memperkenankan dunia perbankan untuk memberikan kredit baru bagi pengadaan dan pengolahan tanah untuk para pengembang, kecuali untuk tujuan pembangunan rumah sederhana. Meskipun kredit macet di sektor properti dewasa ini belum mengkhawatirkan, langkah tersebut di ambil sebagai tindakan berjaga-jaga agar nantinya tidak membahayakan tatanan keuangan nasional.

Dengan berpedoman pada Trilogi Pembangunan itu, perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini tetap pada jalur yang mantap. Pada tahun 1996, laju pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7,98 persen. Dengan demikian selama tiga tahun Repelita VI, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 7,9 persen, dan telah di atas sasaran pertumbuhan rata-rata Repelita VI, bahkan yang telah direvisi, yaitu sebesar 7,1 persen. Momentum pertumbuhan yang relatif tinggi ini merupakan prestasi seluruh pengelola yang perlu dijaga kesinambungannya.

Kegiatan ekonomi masyarakat terus berkembang pesat dan strukturnya mulai berubah dengan semakin berperannya sektor industri. Pada tahun 1996, kontribusi sektor pertanian menurun menjadi 16,5 persen, sedangkan sektor industri meningkat menjadi 25,5 persen.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah (sekitar 1,6 persen pada tahun 1996), maka pendapatan perkapita penduduk Indonesia di tahun 1996 telah mencapai sekitar Rp 2,7 juta atau setara dengan 1155 dolar Amerika Serikat, yang berarti meningkat sekitar 100 dolar terhadap tahun 1995.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu memungkinkan dilaksanakannya upaya-upaya pemerataan. Hasilnya antara lain menurunnya jumlah penduduk miskin, baik secara absolut maupun secara relatif terhadap keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin diperkirakan sekitar 22,5 juta orang atau 11,3 persen penduduk Indonesia pada tahun 1996. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1993, maka jumlah penduduk miskin telah turun sebesar 3,4 juta orang atau sekitar 2,3 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam periode 1993-1996 tersebut tercatat lebih banyak dibandingkan periode 1990-1993. Adanya percepatan ini tidak terlepas dari berbagai program pemerataan yang dilaksanakan dalam Repelita VI.

Selain itu, upaya membangun lapisan usaha kecil dan menengah terus kita galakkan. Kegiatan usaha kita memang masih di dominasi oleh sejumlah kecil pengusaha besar yang mempunyai aset besar. Sedangkan usaha kecil yang jumlahnya sangat besar hanya memiliki aset yang kecil. Sementara itu, lapisan pengusaha menengah belum berkembang secara sehat dan mantap. Dalam Repelita VI telah dikembangkan beberapa skim kredit dan pembiayaan serta pembinaan untuk usaha kecil dan menengah. Misalnya saja, melalui ketentuan bagi setiap bank untuk setidaknya-tidaknya menyalurkan kredit kepada usaha kecil sebesar 22,5% dari keseluruhan kredit yang disalurkan. Contoh lain adalah digalakkannya modal ventura (*venture capital*), yang selain memperkuat modal usaha kecil juga sekaligus membina manajemen usahanya.

Pencapaian pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan tersebut dapat berlangsung karena stabilitas ekonomi yang semakin mantap. Hal ini tercermin dari laju inflasi yang semakin rendah, menuju sasaran yang kita canangkan dalam Repelita VI. Pada tahun 1996/97 laju inflasi telah turun menjadi 5,2 persen dibandingkan dengan tahun 1995/96 dan 1994/95 yang masing-masing sebesar 8,9 persen dan 8,6 persen. Kecenderungan menurunnya laju inflasi dalam periode yang cukup panjang dan secara tak terputus sangat penting artinya bagi masyarakat. Karena, pertama, kenaikan harga akan menjadi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin yang pendapatannya sangat terbatas. Kedua, gejala harga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha sehingga mempersulit mereka dalam mempersiapkan dan melaksanakan rencana kegiatannya. Ketiga, dalam perekonomian yang semakin terbuka, laju inflasi di dalam negeri yang lebih tinggi dari laju inflasi mitra dagang kita dapat memperlemah daya saing produk-produk kita. Hal ini tidak saja untuk pasar ekspor kita, tetapi juga pasar domestik karena barang dan jasa semakin bebas bergerak dari satu negara ke negara lain.

Kemantapan stabilitas ekonomi kita memang sedang mengalami ujian berat tahun 1997 ini.

Meskipun laju inflasi dapat kita kendalikan sebesar 3,2 persen selama periode Januari-Juli 1997, kemungkinan inflasi meningkat cepat pada bulan-bulan selanjutnya dapat terjadi sebagai akibat musim kering yang panjang dalam tahun ini serta guncangan nilai tukar Rupiah yang baru saja mereda. Berbagai upaya saat ini sedang kita lakukan agar laju inflasi tetap terkendali antara lain dengan memantapkan distribusi bahan makanan pokok. Selain itu nilai tukar Rupiah diupayakan kembali mantap pada tingkat yang menunjang tercapainya sasaran pembangunan. Fenomena gejolak nilai tukar Rupiah, dan juga berbagai mata uang di kawasan ASEAN, merupakan fenomena baru bagi kita dan saat ini masih terus diwaspadai dan menjadi pusat perhatian utama di tanah air. Oleh karena itu, perkenankanlah saya menguraikan serba sedikit perkembangan ini.

IV. Gejolak Nilai Tukar Rupiah

Upaya memantapkan nilai tukar Rupiah saat ini menjadi lebih rumit dengan semakin terkaitnya kegiatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain dalam satu kawasan maupun kawasan lain. Dalam dua bulan terakhir, mata uang negara-negara di Asia Tenggara: Baht Thailand, Peso Philippina, Ringgit Malaysia, Dolar Singapura, dan Rupiah Indonesia mengalami percepatan depresiasi terhadap Dolar Amerika Serikat. Menguatnya nilai tukar Dolar ini tidak semata-mata terjadi terhadap mata uang - mata uang di kawasan Asia Tenggara saja, namun juga terjadi terhadap mata uang - mata uang utama dunia seperti DM Jerman dan Yen Jepang. Dengan demikian menguatnya nilai tukar Dolar ini merupakan fenomena moneter internasional.

Penguatan nilai tukar Dolar terhadap mata uang utama dunia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang membaik akhir-akhir ini. Pada triwulan pertama tahun 1997 pertumbuhan produksinya diperkirakan mencapai 5,9 persen dan untuk keseluruhan tahun 1997 pertumbuhan tersebut diperkirakan mencapai 3,5 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1994. Tingkat pengangguranpun menurun menjadi 5,0 persen pada bulan Juni 1997, dibandingkan 5,6 persen pada tahun 1995 dan 1996. Di sisi lain, menguatnya nilai Dolar juga didukung oleh adanya kesepakatan negara-negara kelompok G7 untuk tidak melakukan intervensi pasar terhadap kenaikan Dolar. Di samping itu, kebijaksanaan *Federal Reserve* (*Fed*, Bank Sentral Amerika Serikat) untuk meningkatkan suku bunga *Fedfund* pada awal tahun 1997 juga turut mendorong menguatnya nilai tukar Dolar terhadap mata uang utama lainnya.

Apabila diamati lebih lanjut, dalam tahun-tahun terakhir defisit transaksi berjalan negara-negara di Asia Tenggara cukup tinggi. Meningkatnya defisit ini antara lain didorong oleh besarnya arus modal yang masuk. Derasnya aliran modal masuk ke kawasan Asia Tenggara disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan beberapa faktor lainnya seperti relatif tingginya suku bunga perbankan, makin maraknya perkembangan pasar modal, serta meningkatnya pinjaman sektor swasta di masing-masing negara. Proporsi aliran dana jangka pendek diperkirakan meningkat cukup pesat ke kawasan Asia Tenggara selama tahun terakhir ini.

Perkembangan defisit transaksi berjalan negara-negara di Asia Tenggara yang tidak kunjung membaik dalam tahun terakhir ini, menjadikan nilai tukar mata uang di negara-negara ini diperkirakan mengalami *overvalued*, khususnya mata uang yang menggunakan sistem *fixed exchange rate* seperti Peso, Baht dan Ringgit. Hal inilah yang mendorong *fund manager* melakukan pembelian Dolar secara besar-besaran yang dimulai di Thailand dan selanjutnya merambat ke negara-negara disekitarnya.

Pemicu dari pembelian Dolar dalam jumlah besar di Thailand adalah jatuh temponya pembayaran sebagian besar pinjaman swasta pada akhir bulan Juni 1997 yang tidak dapat diimbangi oleh upaya pinjaman baru. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh *fund manager* untuk membeli Dolar dalam jumlah besar di negara tersebut. Tindakan ini mengakibatkan merosotnya nilai tukar Baht terhadap Dolar. Untuk itu Pemerintah Thailand mencoba menyesuaikan (mendevaluasikan) nilai tukar Baht terhadap Dolar sebesar 18 persen pada tanggal 2 Juli 1997, dan selanjutnya menerapkan sistem nilai tukar mengambang murni (*pure floating exchange rate*). Begitu pula Pemerintah Philippina menganut sistem tersebut setelah mendevaluasikan mata uangnya sebesar 12 persen pada tanggal 11 Juli 1997. Malaysia juga berpindah ke sistem *flexible exchange rate* pada awal bulan Juli 1997 dan hingga akhir bulan Juli 1997 depresiasi Ringgit telah mencapai 12 persen terhadap Dolar.

Di Indonesia, upaya-upaya untuk mewaspadai masalah yang akan timbul dengan menguatnya nilai tukar Dolar telah dilakukan sejak pertengahan tahun 1996. Pada bulan Juli 1996, dilakukan pelebaran rentang intervensi dari 3 persen menjadi 5 persen, dan pada bulan September 1996 dilebarkan lagi menjadi 8 persen. Meskipun tingkat suku bunga perbankan sedikit menurun dalam tahun 1996, arus modal yang masuk masih besar sehingga Rupiah cenderung menguat. Untuk meredam imbas spekulasi di negara-negara tetangga, Pemerintah Indonesia kembali memperlebar rentang intervensi dari 8 persen menjadi 12 persen pada tanggal 11 Juli 1997. Walaupun demikian nilai tukar Rupiah merosot cukup tajam. Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan moneter yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang sudah berubah menjadi sistem nilai tukar yang fleksibel, Pemerintah menghapuskan rentang intervensi kurs Rupiah pada tanggal 14 Agustus 1997. Hal ini berarti sejak tanggal tersebut kurs Rupiah ditentukan oleh pasar.

Nilai tukar Rupiah hingga tanggal 19 Agustus 1997 masih bergerak melemah, yaitu mencapai sekitar Rp. 3.000,- per Dolar. Jika dibandingkan posisi nilai tukar pada akhir tahun 1996, pada tanggal tersebut Rupiah telah terdepresiasi sekitar 25 persen.

Dalam upaya mengendalikan merosotnya nilai Rupiah, Pemerintah Indonesia melakukan kebijaksanaan pengetatan jumlah uang beredar melalui penghentian sementara perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), menaikkan tingkat diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta mengalihkan deposito BUMN ke dalam SBI. Selain itu juga kepada dunia perbankan diimbau untuk menghindari pembelian Dolar dalam jumlah besar serta himbuan kepada masyarakat agar tenang dan tidak ikut-ikutan melakukan pembelian Dolar secara berlebihan. Pada tanggal 25 Juli 1997, tingkat diskonto SBI dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10,0 persen dan dinaikkan lagi menjadi 20,0 persen pada tanggal 19 Agustus 1997.

Pengetatan jumlah uang beredar telah mendorong naiknya tingkat suku bunga perbankan, baik deposito maupun kredit dalam bulan Agustus 1997. Demikian pula tingkat suku bunga antar bank mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu mencapai 54,5 persen untuk pinjaman satu malam (*overnight*) pada tanggal 15 Agustus 1997.

Dengan naiknya tingkat suku bunga perbankan serta masih belum tercapainya keseimbangan baru nilai tukar Rupiah telah memicu investor pasar modal untuk menjual sahamnya sehingga harga saham di bursa efek Jakarta mengalami penurunan yang cukup besar. Sampai dengan tanggal 18 Agustus 1997 indeks harga saham gabungan mencapai 599,6. Hal ini berarti turun sebesar 20,4 persen dibandingkan posisi 1 Agustus 1997 yang sebesar 721,8.

Di samping itu dilakukan pula kebijaksanaan fiskal berupa penundaan pencairan anggaran rutin dan pembangunan sejak tanggal 11 Agustus 1997. Langkah kebijaksanaan tersebut telah diperlonggar dengan dilayaninya pencairan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dengan nilai kontrak di bawah 100 juta rupiah untuk pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi, serta pekerjaan konsultasi yang tidak melebihi 50 juta rupiah sejak tanggal 19 Agustus 1997.

Kita memang membatasi pencairan dana anggaran pemerintah. Namun kita belum memutuskan mengenai penjadwalan proyek-proyek pembangunan, dan masih melihat pengaruh perkembangan moneter dalam beberapa waktu mendatang terhadap keuangan negara. Depresiasi Rupiah memang akan menaikkan penerimaan negara, seperti penerimaan minyak bumi dan gas alam, bea masuk, dan pajak ekspor. Tetapi depresiasi tersebut juga menaikkan belanja negara, seperti untuk pembayaran pinjaman luar negeri, penyediaan dana subsidi BBM karena biaya penyediaannya yang meningkat, dan juga berbagai belanja luar negeri. Di samping itu juga harus diperhitungkan kenaikan harga di dalam negeri yang akan berpengaruh pada biaya proyek. Semuanya itu masih dalam pengamatan kita. Namun, jika nantinya ada penjadwalan, proyek-proyek berbantuan luar negeri mendapat prioritas untuk diteruskan. Karena pada umumnya proyek-proyek itu diperoleh dengan biaya yang relatif murah, yaitu 2,5%-3,0%, dan memang memiliki prioritas yang tinggi.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa nilai Rupiah mulai menguat pada tanggal 20 Agustus 1997 dan kembali pada posisi sekitar Rp 2700,- pada tanggal 21 Agustus 1997. Perdagangan saham di pasar modal juga mulai bergerak naik. Cadangan devisa kita saat ini masih berkisar 21 miliar Dolar Amerika Serikat, yang memadai untuk membiayai 5 bulan impor non migas. Hal ini menunjukkan dasar-dasar perekonomian Indonesia yang kuat sehingga mampu meredam goncangan nilai tukar tersebut.

Walaupun goncangan moneter tersebut mulai mereda, kita tetap harus waspada. Cadangan devisa memang cukup mantap. Namun kecenderungan melebarnya defisit transaksi berjalan harus terus ditekan, karena dapat menjadi sumber kegelisahan di masyarakat, yang pada gilirannya dapat ikut mendorong tindakan spekulasi. Dalam tahun anggaran lalu, upaya menekan meningkatnya defisit transaksi berjalan ini memang menunjukkan hasil. Pada tahun 1995/96, rasio defisit transaksi berjalan terhadap *Gross Domestic Product (GDP)* tercatat 3,4%, jauh meningkat dari tahun 1993/94 yang sebesar 1,9%. Pada tahun 1996/97, defisit tersebut hanya melebar dengan 0,1% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 3,5% GDP.

Keberhasilan itu tidak terlepas dari upaya mengendalikan permintaan masyarakat sehingga laju impor menurun dari 21,6% pada tahun 1995/96 menjadi hanya setengahnya saja, yaitu 10,4% pada tahun 1996/97. Tetapi upaya menekan impor sekecil-kecilnya bukan merupakan tujuan kita, karena kita masih membutuhkan impor, terutama impor barang modal dan juga bahan baku, untuk menopang berbagai investasi di tanah air. Oleh karena itu yang lebih penting lagi di sini adalah bagaimana menggenjot ekspor, terutama ekspor nonmigas. Ekspor nonmigas yang diharapkan menjadi andalan, akhir-akhir ini menunjukkan perlambatan. Laju ekspor terus mengalami perlambatan dari 15,5% pada tahun 1994/95, menjadi 13,3% pada tahun 1995/96 dan melambat lebih jauh menjadi 9,0% pada tahun 1996/97.

Di dalam negeri, upaya untuk meningkatkan kembali ekspor ini ditempuh dengan sedapat mungkin menekan ongkos produksi. Berbagai deregulasi telah dilakukan untuk itu, yang terakhir yang diumumkan pada bulan Juli yang baru lalu. Dalam deregulasi itu, antara lain diturunkan 1.600 tarif pos bea masuk. Dengan demikian produksi barang-barang, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diekspor, dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan keterlibatan pengusaha kecil dan menengah di dalam kegiatan ekspor, nilai pengiriman barang ekspor yang tidak perlu dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 300 juta. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk mendukung ekspor nonmigas.

Selanjutnya, melalui deregulasi dalam bidang investasi, perusahaan-perusahaan non-PMA/PMDN, yang banyak diantaranya merupakan pengusaha kecil dan menengah, diberikan perlakuan yang sama dengan perusahaan PMA/PMDN dalam melakukan impor barang modal dan bahan baku. Penghapusan perbedaan tersebut juga berlaku secara luas, sehingga diharapkan menggairahkan investasi nasional. Di bidang keuangan negara, jumlah berbagai pungutan yang dapat dilakukan daerah dikurangi.

Selain upaya-upaya di dalam negeri itu, upaya yang juga sangat penting adalah Amemasarkan@ Indonesia di luar negeri, baik untuk meningkatkan ekspor maupun menarik investasi. Saya kira hal ini kita pahami benar artinya. Hal ini menjadi lebih penting bagi negara-negara yang letaknya secara geografis berjauhan dengan tanah air seperti negara-negara Eropa ini.

V. Agenda Pembangunan

Berbagai perkembangan perekonomian Indonesia seperti yang saya uraikan di atas tidak terlepas dari perkembangan dunia yang semakin menyatu. Gejala nilai tukar, perkembangan ekspor-impor, semuanya merupakan bagian dari arus globalisasi. Tidak ada bangsa di dunia ini yang bisa memilih tidak ikut, karena berarti akan tersingkir dari arus perdagangan dan pergaulan ekonomi masyarakat dunia. Hubungan internasional menganut asas resiprositas. Kalau kita ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya memasuki pasar orang lain, kita juga harus memberikan kesempatan pada orang lain untuk memasuki pasar kita. Jadi persoalan yang mendasar di sini adalah kita memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang timbul, dan mengurangi sekecil-kecilnya dampak yang merugikan. Kuncinya, dan dengan demikian juga merupakan agenda pembangunan yang *pertama*, adalah meningkatkan daya saing. Peningkatan daya saing ini harus bersumber dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan tidak bisa melalui cara yang lain. Proteksi untuk sementara masih bisa digunakan untuk menopang daya saing di dalam negeri. Itupun secara bertahap harus dilepaskan, lebih cepat lebih baik, karena adanya proteksi menyebabkan beberapa lini ekonomi memproduksi secara tidak efisien. Secara ringkasnya, kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi baik makro maupun sektoral, baik moneter dan fiskal maupun di sektor riil, harus dilaksanakan serempak dan harmonis dalam mendukung peningkatan daya saing tersebut.

Di sektor ekonomi modern yang sudah cukup berkembang, kita telah memiliki kelompok-

kelompok yang cukup kuat dan mempunyai peluang untuk berkompetisi. Yang menjadi masalah adalah kondisi masyarakat yang belum cukup kuat itu dalam menghadapi persaingan tersebut. Oleh karena itu, membangun ekonomi usaha kecil, menghilangkan kemiskinan, mendorong kemajuan wilayah-wilayah yang tertinggal, harus menjadi agenda pembangunan yang *kedua* dalam menghadapi globalisasi.

Agenda *ketiga*, yang juga terkait erat dengan agenda pertama, adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah sebetulnya letak perlombaan. Kalau globalisasi dianggap sebagai suatu perlombaan, maka yang diperlombakan sebetulnya adalah kualitas SDM dan penguasaan iptek.

SDM yang berkualitas adalah yang bersikap maju dan berpikir modern, yang produktif dan profesional. Di atas SDM yang demikian itulah kita membangun iptek karena kemampuan iptek bukan hanya tercermin dari peralatan yang dimiliki, melainkan kemampuan kreatif dan inovatif dari manusianya. Maka membangun SDM dan iptek pada hakikatnya adalah sama, dan pada dasarnya keduanya berkaitan dengan masalah budaya. Dengan demikian, membangun kebudayaan bangsa dan memperkuat ketahanannya harus menjadi agenda pembangunan yang *keempat*.

Demikian beberapa pokok agenda pembangunan secara garis besarnya. Masing-masing dari kita dapat mempertimbangkan bentuk-bentuk hubungan internasional yang dapat menjawab agenda-agenda pembangunan itu. Saya mencatat adanya berbagai bentuk hubungan yang sudah terjalin ke arah itu, yang semoga dapat terus kita tingkatkan di masa datang. Dengan demikian, seperti yang sudah saya singgung di muka, potensi untuk memanfaatkan keterbukaan perdagangan dan pergaulan antar bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya.

Secara umum, dari segi perdagangan luar negeri, potensi untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara anggota Persemakmuran Negara-negara Merdeka (PNM atau *C.I.S.*) dan negara-negara lain di kawasan Eropa ini masih cukup tinggi. Ini antara lain tercermin pada pangsa impor dari Indonesia terhadap keseluruhan impor di masing-masing negara secara umum sangat rendah, hanya sekitar 1% saja.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa untuk meningkatkan ekspor kita adalah jauh dari mudah. Lagipula tidak dapat hanya dilaksanakan oleh sebagian dari kita, tetapi harus menyeluruh secara nasional. Namun, mungkin di beberapa negara (misalnya negara-negara anggota PNM), Indonesia masih diingat karena kerjasama yang pernah terjalin dengan negara-negara tersebut di jaman Orde Lama dahulu. Saat itu kita pernah membanjiri pasar mereka dengan produk-produk andalan ekspor kita. Dan sebaliknya, mereka pun memasarkan produk-produknya ke pasar kita di Indonesia. Dengan demikian, setelah masa-masa itu berlalu, sekarang waktunya bagi Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan kembali produk-produk ekspor Indonesia, yang tentunya sekarang ini lebih bermutu dan lebih beragam, kepada negara-negara tersebut.

Apabila saya amati lebih lanjut, negara-negara di mana Bapak dan Ibu bertugas ada juga yang merupakan anggota dari beberapa kelompok kerjasama ekonomi, misalnya OECD, Masyarakat Eropa, ataupun anggota dari ECO (Economic Cooperation Organization). Dengan dikenalnya produk ekspor kita ke negara-negara ini akan pula menunjang terbukanya akses pasar terhadap produk ekspor kita ke kelompok kerjasama ekonomi tersebut.

Perkembangan perekonomian yang semakin terbuka menuntut kerjakeras di semua lini agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kita menaruh harapan yang sangat besar pada perwakilan negara kita di luar negeri, sebagai yang langsung berhubungan dengan bangsa-bangsa di dunia. Informasi-informasi langsung dari lapangan akan sangat berguna bagi penyusunan langkah-langkah kita selanjutnya.

Dalam hal penanaman modal, kita mencatat adanya kesepakatan untuk peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal, antara lain dengan Denmark, Finlandia, Kyrgyzstan, Mongolia, Polandia, Rumania. Selain itu sudah disepakati pula adanya penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara-negara Denmark, Finlandia, dan Swedia. Kesepakatan ini nampaknya belum banyak menarik investor negara-negara tersebut ke Indonesia. Hingga tahun 1997 ini baru tercatat 4 negara kawasan Baltik dan PNM yang menanamkan modalnya yaitu Turki, Finlandia, Swedia, dan Denmark. Pada tahun 1996 tercatat 6 proyek PMA dari negara-negara tersebut dengan nilai sekitar 44 juta Dolar. Melihat

perkembangan ini tentunya kita harus semakin giat mempromosikan daya tarik investasi di Indonesia.

Selain itu beberapa negara di kawasan Baltik telah pula secara tetap memberikan pinjaman dan hibah, seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia. Bantuan pinjaman dan hibah ini kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Beberapa proyek yang mendapatkan bantuan Norwegia antara lain menyangkut pemanfaatan gelombang laut sebagai pembangkit energi listrik, pemantauan kualitas perairan laut, dan pemetaan digital untuk batas perairan laut. Sedangkan Denmark memberikan bantuan pada beberapa proyek seperti pilot proyek pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum dan pengembangan teknologi pembenihan kehutanan. Dari Swedia kita memperoleh bantuan dalam rangka pengembangan Daerah Aliran Sungai, dan konservasi lingkungan di lahan kering, serta studi pengembangan transportasi udara di kawasan Indonesia timur. Saat ini kita kembali merintis kerjasama dengan Rusia. Hubungan ini perlu kita tingkatkan agar kita mendapatkan manfaat pula dari kemajuan Rusia. Dengan Cekoslovakia kita dapat menjalin kerjasama di bidang industri dan ilmu pengetahuan.

Saya tidak akan memperpanjang lagi berbagai daftar kerjasama ini, karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian memiliki daftar itu secara lengkap untuk masing-masing negara. Hal ini saya kemukakan semata-mata sebagai pengantar kita untuk berdialog guna melihat kemungkinan-kemungkinan lebih lanjut dalam meningkatkan kerjasama kita dengan negara-negara di kawasan ini.

Sekian dan Terimakasih.